



LAPORAN BMN SEMESTER I 2025



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

PSDKP TAHUNA



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Stasiun PSDKP Tahuna ini mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Tahuna. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Tahuna 31 juli 2025

Kepala Stasiun PSDKP Tahuna

Martin Yermias Luhulima, S.H., M.si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	l
DAFTAR TABEL	li
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM	2
III. STASIUN PSDKP TAHUNA	7
IV. PERIODE LAPORAN	8
V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	8
VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	15
VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	20
VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025	21
1. BMN per Akun Neraca	69
2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	71
IX. INFORMASI BMN LAINNYA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Nilai BMN Persediaan, <i>Intrakomptabel</i> , dan <i>Ekstrakomptabel</i> Sebelum Penyusutan Per 30 Juni 2025 dan periode sebelumnya di Stasiun PSDKP Tahuna KKP	22
Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Tahuna KKP Semester I Tahun 2025, Per 30 Juni 2025	24
Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna KKP	24
Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Stasiun PSDKP Tahuna Semester I Tahun 2025	
Tabel 5. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	26
Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	27
Tabel 7. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	28
Tabel 8. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	28
Tabel 9. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	28
Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	29
Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode Semester I Tahun 2025	29
Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	30
Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	30
Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	30
Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	30
Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	32

Tabel 17. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penyerahan Kepada Masyarakat Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	
	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	32
Tabel 19. Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun pada Stasiun PSDKP Tahuna Periode Semester I Tahun 2025	33
Tabel 20. Mutasi Tambah Tanah Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	33
Tabel 21. Mutasi Kurang Tanah Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	34
Tabel 22. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025	
Tabel 23. Rincian Permasalahan BMN berupa Tanah Per 30 Juni 2025	34
Tabel 24. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	35
Tabel 25. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	36
Tabel 26. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	36
Tabel 27. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025	36
Tabel 28. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	55
Tabel 29. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	56
Tabel 30. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	56
Tabel 30. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya	57
Tabel 32. Rincian Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	59
Tabel 33. Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Tahuna	60
Tabel 34. Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Tahuna	60
Tabel 35. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya	60
Tabel 36. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Stasiun PSDKP Tahuna	64
Tabel 37. Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	

Tabel 38. Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	
Tabel 39. Bahan Perpustakaan Berdasarkan Status Kondisinya	
Tabel 40. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	64
Tabel 41. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	65
Tabel 42. Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Stasiun PSDKP Tahuna	65
Tabel 43. Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025.	66
Tabel 44. Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	66
Tabel 45. Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	66
Tabel 46. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Tahuna	67
Tabel 47. Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Tahuna	67
Tabel 48. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Tahuna	67
Tabel 49. Mutasi Tambah <i>Software</i> Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	
Tabel 50. Mutasi Kurang Tambah <i>Software</i> Pada Stasiun PSDKP Tahuna	
Tabel 51. Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Tahuna	68
Tabel 52. Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	69
Tabel 53. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	69
Tabel 54. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	69
Tabel 55. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	70
Tabel 56. Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	71
Tabel 57. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna	73

Tabel 58. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN	73
Tabel 59. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna	76
Tabel 60. Ringkasan Pengelolaan BMN <i>Idle</i> Pada Stasiun PSDKP Tahuna	
Tabel 61. Ringkasan BMN dari Dana Dekonsentrasi Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025	
Tabel 62. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Stasiun PSDKP Tahuna	77
Tabel 63. Ringkasan BMN Hilang Pada Stasiun PSDKP Tahuna	78
Tabel 64. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat Per 30 Juni 2025	78
Tabel 65. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang Per 30 Juni 2025	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	7
Gambar 2. Transformasi Infrastruktur <i>One Data System</i>	16
Gambar 3. Transformasi Aplikasi	17
Gambar 4. Strategi Transformasi Teknologi Informasi	17
Gambar 5. Integrasi Aplikasi sesuai dengan <i>One Data System</i>	18
Gambar 6. Capaian Program Satu Data/ <i>One Data System</i> KKP	

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu syarat mutlak dalam mewujudkan *good governance* untuk memenuhi konsep responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data BMN dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan aturan turunannya yang mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan

pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Terkait dengan laporan BMN, Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tahuna Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahuna ini merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Direktorat Jenderal PSDKP. Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 19 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-530/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Stasiun PSDKP Tahunan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020;
37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
39. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH);
40. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor Nomor: B.2377/SJ.2/KU.140/VI/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Kelautan

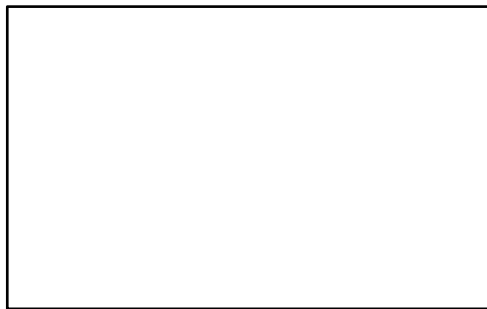
Dan Perikanan Periode Semester I Tahun Anggaran 2025;

41. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
42. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
43. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
44. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK- BMN.
45. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-3/PB/PB.6/2025 tentang Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO)

III. STASIUN PSDKP TAHUNA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas pokok yaitu sebagai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Struktur organisasi Stasiun PSDKP Tahuna dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Stasiun PSDKP Tahuna terdiri dari **47** pegawai, terdiri dari ASN sebanyak 33 pegawai dan PPNP sebanyak 14 pegawai. Adapun Tugas dan Fungsi dari **Stasiun PSDKP Tahuna** adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Kuasa Pengguna Direktorat Jenderal PSDKP Semester I Tahun 2025 ini disusun dan disajikan untuk Semester I sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Stasiun PSDKP Tahuna sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Stasiun PSDKP Tahuna dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Stasiun PSDKP Tahuna.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Stasiun PSDKP Tahuna sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Stasiun PSDKP Tahuna dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Stasiun PSDKP Tahuna dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

3. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

4. Kebijakan Kapitalisasi

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

5. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan SIMAK-Persediaan, yang digunakan pertama kali pada tahun 2008,

hingga kini masih digunakan pada penyusunan LBP BMN KKP. Namun, Aplikasi yang semula digunakan pada setiap level unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB), kini hanya digunakan pada level UAKPB guna pencatatan transaksi-transaksi Barang Milik Negara, baik moneter maupun nonmoneter. Versi terakhir yang digunakan hingga ini adalah SIMAK-BMN Versi 21.0.0-Referensi 21.0.0 dan SIMAK-Persediaan Versi 21.0.0.

6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2025. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2025 *Audited*. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2025.

Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.

7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, *Software*, lisensi, dan waralaba (*franchise*). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

8. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan

memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN *online*, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 30 Juni 2017 (*Audited*), sebagai *base data online* SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 September 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon&LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data *online* ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Stasiun PSDKP Tahunan (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui *upload* data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan

pemutakhiran data BMN secara *online* dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program ‘Satu Data’ atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

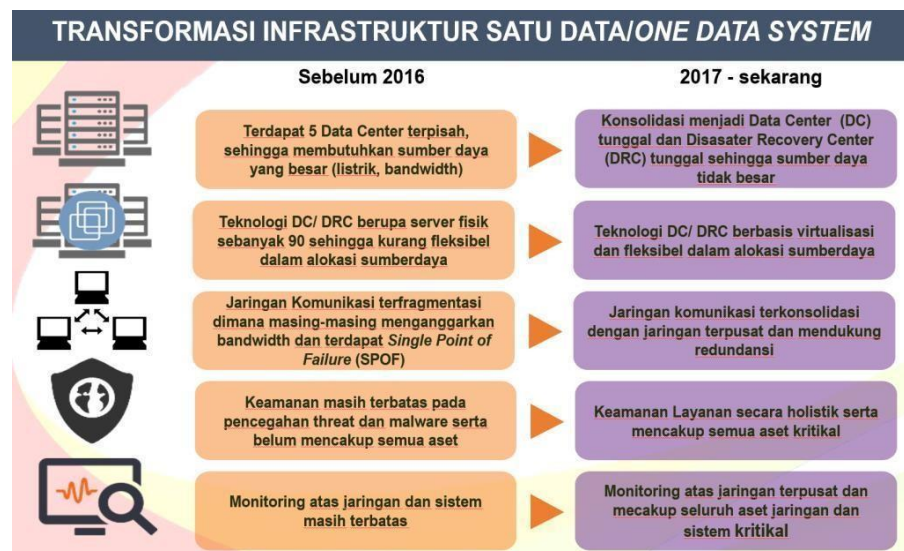
One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Stasiun PSDKP Tahunaan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

30/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2025

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016;
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016;
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin;
- 4) Alih Status Sistem Informasi;
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi;
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi;
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin.

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

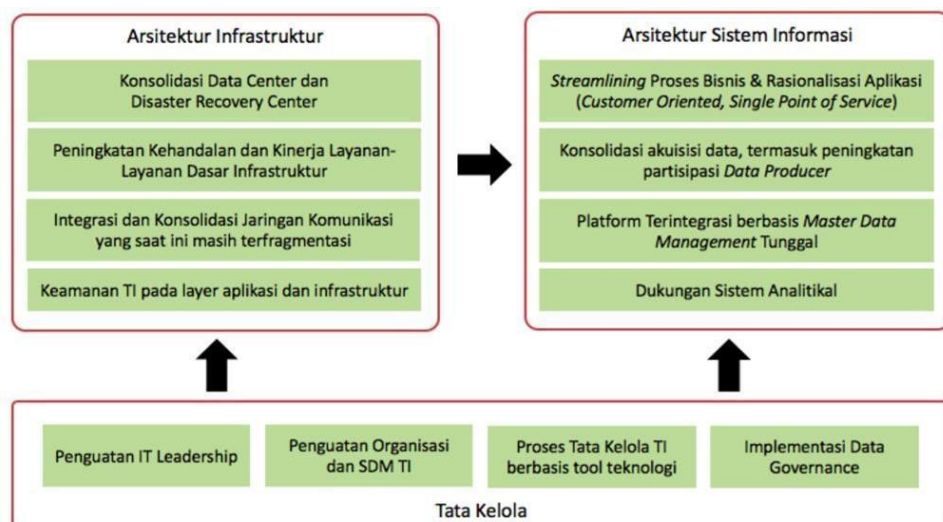


Gambar 2. Transformasi Infrastruktur *One Data System*

TRANSFORMASI APLIKASI		
KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA	 - 2016	2017 - ...
	SEBELUM ONE DATA	SETELAH ONE DATA
• Master Data • Basis Pengembangan Aplikasi • Aplikasi Pendataan Produksi • Jumlah aplikasi • Keamanan Aplikasi	- Redundan/ Tidak Konsisten - Struktur Organisasi - Beberapa Aplikasi 295 Aplikasi - Belum Terkelola Baik	- Tunggal Dan Konsisten - Siklus Fungsional - satudata.kkp.go.id 19 Aplikasi Utama - Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
• Validasi Data Kependudukan	Manual	Validasi E-KTP Online melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI
• Dokumentasi arsitektur aplikasi	Tidak Ada	Terdokumentasi Dengan Baik

Gambar 3. Transformasi Aplikasi

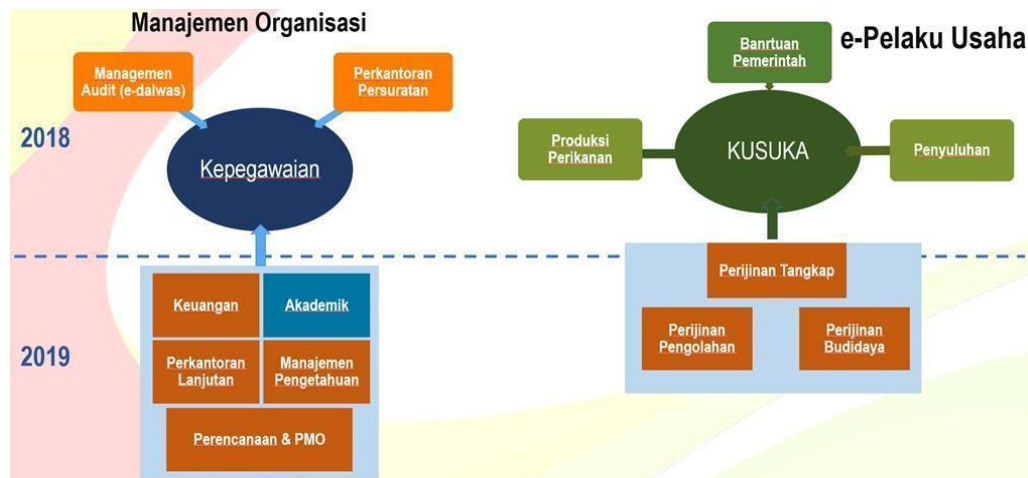
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang dillustrasikan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 4. Strategi Transformasi Teknologi Informasi

Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan;
2. Aplikasi yang berkaitan dengan *Stakeholders* Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).



Gambar 5. Integrasi Aplikasi sesuai dengan *One Data System*



Gambar 6. Capaian Program Satu Data/One Data System KKP

Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka *One Data System* diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen dan diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Stasiun PSDKP Tahuna KKP periode Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Stasiun PSDKP Tahuna hingga 30 Juni 2025.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB (LBKP) Stasiun PSDKP Tahuna ini adalah sebesar 53.187.349.340,00 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 52.782.213.346,00 dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 1.525.636.959. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar.
2. Daftar Isi.
3. Daftar Gambar.
4. Daftar Tabel.
5. Neraca Stasiun PSDKP Tahuna Anggaran 2025, per tanggal 30 Juni 2025.

6. Laporan Barang Persediaan.
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Sub Kelompok Barang.
9. Laporan Aset Tak Berwujud.
10. Laporan Barang Bersejarah.
11. Laporan Kondisi Barang.
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
13. Laporan Barang Hilang.
14. Laporan Barang Rusak Berat.
15. Laporan Barang Hibah DK/TP.
16. Catatan atas LBKP.

Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Stasiun PSDKP Tahuna KKP per tanggal 30 Juni 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada Stasiun PSDKP Tahuna KKP periode Tahun Anggaran 2025.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 1 Januari 2025 sebelum penyusutan menurut Stasiun PSDKP Tahuna adalah sebesar Rp53.162.993.140,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp53.161.499.640,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp1.493.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan saldo BMN per tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp53.187.349.340,00 (lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp53.161.499.640,00 (lima puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp1.493.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode berjalan, sebesar Rp0,00 (nol rupiah). yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dalam perubahan nilai BMN Persediaan, BMN *intrakomptabel*, dan BMN *ekstrakomptabel* sebelum penyusutan disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Nilai BMN Persediaan, *Intrakomptabel*, dan *Ekstrakomptabel* Sebelum Penyusutan Per dan periode sebelumnya di Stasiun PSDKP Tahuna KKP

Kode	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Rp)	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	734.968.204	676.774.670	-58.193.534	
Jumlah Aset Lancar					
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				
1301	Tanah	2.228.156.034	2.228.156.034	-	
1321	Peralatan dan Mesin	39.867.756.737	39.892.112.937	-24.356.200	
1330	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	10.071.443.993	-	
1341	Jalanan Irigasi dan Jaringan	995.251.376	995.251.376	-	
1351	Aset Tetap Lainnya				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah Aset Tetap					
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak digunakan dalam operasi pemerintahan				

Kode	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Rp)	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
	Berwujud				
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	385.000	385.000	-	
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah				
Jumlah Aset Lainnya					
TOTAL BMN INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN					
BMN EKSTRAKOMPTABEL					
1303	Peralatan dan Mesin	1.493.000	1.493.500		
1330	Gedung dan Bangunan				
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN		53.162.993.140	53.187.349.340		

(tabel dapat dibuat di Ms excel untuk memudahkan pengisian nilai)

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 30 Juni 2025

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp676,774,670 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari saldo awal Rp 734.968.204 (tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dan total mutasi selama Tahun 2025 Rp. 58.193.534 (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) Jumlah tersebut dirinci dalam Tabel di bawah ini

**Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Tahuna
Tahun 2025, Per 30 Juni 2025**

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	15.508.000	-15.101.700	- 29.264.700	1.345.000	
117114	Suku Cadang	719.460.204	+0	- 44.030.534	675.429.670	
Total		734.968.204	+15.101.700	- 73.295.234	676.774.670	

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama periode Tahun 2025, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

**Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Tahuna KKP
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan
Semester I Tahun 2025**

Saldo Awal per 1 Januari 2025	
	734.968.204
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	
M02 Pembelian	15.101.700
M03 Transfer Masuk	
M04 Hibah Masuk	
M06 Perolehan Lainnya	
M10 Reklasifikasi Masuk	
P01 Opname Fisik Bertambah	
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian	73.295.234
K02 Tranfer Keluar	
K03 Hibah Keluar	
K04 Barang Usang	
K05 Barang Rusak	
K07 Penghapusan Lainnya	
K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	
K10 Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Tambah	
K99 Koreksi Kurang	
Saldo Akhir	676.774.670

*dlsi transaksi yang memiliki saldo/ terjadi pada

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*), senilai Rp734.968.204,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) hasil *stock opname* persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Stasiun PSDKP Tahun 2025 Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	15.508.000
117114	Suku Cadang	719.460.204
Total		734.968.204

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

2) Mutasi Persediaan Tahun 2025

Saldo Per 30 Juni 2025 senilai Rp676,774,670 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp734.968.204,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – 30 Juni 2025.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. **Mutasi Kurang (2.2) pada transaksi persediaan meliputi transaksi** (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. **Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3)** merupakan transaksi yang disebabkan atas

penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **stock opname (2.4)** persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil *stock opname* Per 30 Juni 2025.

Nilai persediaan pada Stasiun PSDKP Tahuna mengalami penurunan senilai Rp. 58.193.534 Nilai penurunan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp. 15.101.700, mutasi kurang senilai Rp.73.295.234.

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Stasiun PSDKP Tahuna sebesar Rp15.101.700 (lima belas juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas transaksi Pembelian.

M01 – Penambahan Saldo Awal

Jika terdapat transaksi penambahan saldo awal

FTransaksi penambahan saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (merupakan **NIHIL**

Rincian Persediaan per akun atas transaksi penambahan saldo awal adalah:

Tabel 5. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

a. M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama Periode Semester I tahun 2025 senilai Rp15.101.700 (lima belas juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan Pembelian Barang Konsumsi, Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	423	15.101.700
117114	Suku Cadang	0	0

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

b. M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi/satker dalam satu Eselon I maupun antar Eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Periode Semester I Tahun 2025 memiliki saldo yang sama, yaitu senilai Rp0,00 (nol rupiah)

Rincian Persediaan per akun barang atas transaksi TM-TK adalah:

Tabel 7. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Uraian		Nilai Transfer Keluar	Nilai Transfer Masuk	Selisih
Kode Akun	Uraian Akun			

c. M04 - Hibah Masuk (dlsi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Hibah Masuk selama Semester I Tahun 2025 senilai Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Masuk adalah:

Tabel 8. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

d. M06 – Perolehan Lainnya (dlsi jika satker memiliki transaksi M06)

Perolehan lainnya selama periode Tahun 2025 senilai Rp0

Rincian Persediaan per Akun atas transaksi Perolehan Lainnya adalah:

Tabel 9. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang konsumsi		

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

e. M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk pada periode Tahun 2025 senilai Rp0 (0), sedangkan nilai Reklas Keluar pada periode Tahun 2025 adalah

sebesar Rp0 (0). Tidak terdapat selisih antara Reklas Masuk dan Reklas Keluar.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi RM-RK adalah:

Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian akun	Nilai Reklas Keluar	Nilai Reklas Masuk	Selisih
				0
				0

f. M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Transaksi Koreksi Tambah dan Kurang merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas maupun nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya. Koreksi tambah selama periode Semester I Tahun 2025 senilai Rp0,00 (nol rupiah), sedangkan Koreksi Kurang senilai Rp0,00 (rupiah), dengan rincian per akun sebagai berikut:

Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode Semester I Tahun 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Koreksi Masuk	Koreksi Keluar
TOTAL			

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

g. M13 – Transfer Masuk Online

Transfer Masuk Online merupakan transfermasuk suku cadang dari UPT lain dengan nilai Rp0.00

Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Transfer Masuk Periode Tahun 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

TOTAL		
--------------	--	--

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K10,K99)

a. K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp73.295.234,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan

operasional perkantoran. Persediaan ini berupa barang konsumsi dan suku cadang

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	667	29.264.700
117114	Suku Cadang	33	44.030.534

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

b. K03 – Hibah Keluar

Transaksi Hibah Keluar selama periode Semester I Tahun 2025 senilai Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Keluar adalah:

Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

c. K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama

periode Semester I Tahun 2025 masing-masing senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan Rp0,00 (nol rupiah). Barang usang merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk

operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah:

Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Barang Usang	Barang Rusak
TOTAL			

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

d. K06 – Penghapusan Lainnya (dlsi jika terdapat transaksi ini)

Transaksi Penghapusan Lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah), merupakan transaksi keluarnya barang persediaan karena sebab lainnya.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Penghapusan Lainnya adalah:

Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

e. K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (dlsi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode Semester I Tahun 2025 adalah senilai Rp0,00 (nol rupiah)

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga adalah:

Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya). Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

IV. Hasil *Opname* Persediaan

Transaksi hasil *opname* fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan Per 30 Juni 2025 . Hasil *Opname* Fisik senilai 0 (nol rupiah) terdiri dari nilai total transaksi Hasil *Opname* Fisik P01 senilai Rp0.

Besarnya nilai transaksi Hasil *Opname* Fisik berdasarkan akun yang mempengaruhi saldo persediaan per Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun pada Stasiun PSDKP Tahuna Periode Semester I Tahun 2025

URAIAN		P01 (Hasil Opname Fisik Lebih)	P02 (Hasil Opname Fisik Kurang)	Opname Fisik
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
TOTAL		0	0	0

*) dlsi akun yang memiliki saldo pada neraca

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni Tahun 2025 sebesar Rp2.228.156.034,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) dengan luas 3.641. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 3.641 m² dengan nilai sebesar Rp2.228.156.034,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi :

**Tabel 19. Mutasi Tambah Tanah Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi

**Tabel 20. Mutasi Kurang Tanah Pada Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Luas (m²)
Nihil	

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m²)	Nilai (Rp)
Baik	3.641	2.228.156.034
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Stasiun PSDKP Tahuna.

Tabel 22. Rincian Permasalahan BMN berupa Tanah Per 30 Juni 2025

Permasalahan Tanah	Kuantitas (m²)	Nilai (Rp)
Sengketa; Dst		

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada **Laporan Barang Kuasa Pengguna** Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 39.892.112.937,00 (tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus duabelas ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 39.867.756.737,00 (tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus enampuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) mutasi tambah sebesar Rp 60.079.000,00 (enam puluh juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 35.722.800,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Mutasi tambah Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
pembelian	23.200.000	0	23.200.000
Transfer masuk	36.879.000	0	36.879.000
Transfer keluar	35.722.800	0	35.722.800

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp49,999,950,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1 (Satu) unit dengan nilai sebesar Rp49,999,950,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar

Rp0 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah)

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 24. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 25. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	49.999.950
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp (17.857.125,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu serratus dua puluh lima rupiah).

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp37.258.491.808,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 15 (lima belas) unit dengan nilai sebesar Rp37.258.491.808,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) mutasi tambah jumlah barang Rp. 0 (nol rupiah) 0 unit dan mutasi kurang jumlah barang Rp. 0.00 (nol rupiah) 0 unit. Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Tabel 27. Mutasi Tambah Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Tabel 28. Mutasi Kurang Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Tabel 29. Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	15	37.258.491.808
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp37.154.447.524,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

c. Alat Bengkel dan Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp26.005.000,00 (dua puluh enam juta lima ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp26.005.000,00 (dua puluh enam juta lima ribu rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (Nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Bengkel dan Ukur tersebut meliputi:

**Tabel 30. Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Ukur Pada Stasiun PSDKP
Tahun Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah Alat Bengkel dan Ukur periode Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut

Mutasi kurang Alat Bengkel dan Ukur tersebut meliputi:

**Tabel 30. Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Ukur Pada Stasiun PSDKP
Tahun Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Alat Bengkel dan Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Tabel 32. Alat Bengkel dan Ukur Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	7	26.005.00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Bengkel dan Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2.440.900,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah)

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.210.263.044,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 290 (dua ratus sembilan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp1.210.263.044,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah) mutasi tambah dengan jumlah barang 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp. 23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mutasi kurang jumlah 79 (Tujuh puluh sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp 210.308.760.00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 33. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	23.200.000	0	23.200.000

Penjelasan mutasi tambah alat kantor dan rumah tangga periode Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pembelian

- A.C Split 4 (empat) unit senilai Rp. 23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing unit senilai Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - NUP 23, 24, 25 dan 26
 - Merk/Type Panasonic
 - Nomor kwitansi 00043/KW/170445/2025

Tabel 34. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	241	1.233.463.044
Rusak Ringan	0	0

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp911.310.963,00 (Sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)

e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar 292.111.960,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta serratus sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 63 (enam puluh tiga) unit dengan nilai sebesar Rp. 321.099.685,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Tabel 36. Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	-	-	-
Transfer Masuk	-	-	-
Reklas Masuk	-	-	-

Mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Tabel 37. Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
-	-	-	-
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	51	292.111.960
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.245.069.665,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

f. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00 (nol) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 8 (delapan) unit dengan nilai sebesar Rp8.895.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah dengan jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol) rupiah

Mutasi tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

**Tabel 42. Mutasi Tambah Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 202**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
nihil			

Mutasi kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

**Tabel 43. Mutasi Kurang Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
nihil			

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (0).

g. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna

Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 138,117,125,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp138,117,125, (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Mutasi tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

**Tabel 45. Mutasi Tambah Alat Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

**Tabel 46. Mutasi Kurang Alat Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 47. Alat Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya Per 30
Juni 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	138,117,125
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp124,305,412,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima juta empat ratus dua belas rupiah).

h. Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp641.064.810,00 (enam ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 83 (delapan puluh tiga) unit dengan nilai sebesar Rp721.283.414,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah), mutasi tambah jumlah barang 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp36.879.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan mutasi kurang jumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp35.722.800,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Mutasi tambah Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 48. Mutasi Tambah Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Transfer Masuk	36.879.000	0	36.879.000

Penjelasan mutasi tambah alat komputer periode Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

1. Transfer Masuk Online

- Lap Top 1 (satu) Unit dari Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp. 12.999.000 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan merk *HP Pavillion* dengan nomor BAST B.920/PSDKPSta.7/PL.450/V/2025 membentuk NUP 32
- Lap Top 1 (satu) Unit dari Pangkalan PSDKP Bitung senilai Rp. 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan merk *Acer* dengan noor BAST B.2529/PSDKPLan.5/PL.450/VI/2025 membentuk NUP 33
- Tablet PC 1 (satu) Unit dari Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp. 9.530.000 (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan merk *Samsung Galaxy Tab* dengan nomor BAST B.920/PSDKPSta.7/PL.450/V/2025 membentuk NUP 3

Mutasi kurang Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 49. Mutasi Kurang Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Transfer keluar	35.722.800		35.722.800

Penjelasan mutasi kurang alat komputer periode Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

- Transfer keluar Lap Top ke Pangkalan PSDKP Bitung 1 (satu) unit senilai Rp16.875.000 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan merk *Acer* dan nomor BAST B.730/PSDKPSta.6/PL.930/VI/2025
- Transfer keluar Lap Top ke Stasiun PSDKP Pontianak 1 (satu) unit senilai Rp18.847.800 (delapan belas juta delapan

ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan merk *Dell* dan nomor BAST B.731/PSDKPSta.6/PL.930/VI/2025

Dari jumlah Alat Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	66	641.064.810
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar RP589.638.937,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

i. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar RP 252.859.240,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 20 (dua puluh) unit dengan nilai sebesar Rp.257.591.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) mutasi tambah jumlah

barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol) dan mutasi kurang jumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp4.730.760,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Mutasi tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

**Tabel 51. Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP
Tahun Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

**Tabel 52. Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP
Tahun Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
nihil			

Penjelasan mutasi kurang alat keselamatan kerja periode Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

penghapusan dengan Nomor SK 422/KEPMEN-KP/PL.750/III/2025

- Snorkel 2 (dua) unit senilai Rp. 4.730.760 (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Alat Keselamatan Kerja Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	18	252.859.240
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat	0	0
-------------	---	---

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp252.859.240,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

V. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada **Laporan Barang Kuasa Pengguna** Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp10.071.443.993,00 (sepuluh miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 10 (sepuluh) unit dengan nilai sebesar Rp10.071.443.993,00 (sepuluh miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), mutasi tambah sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp790.557.800,00 (tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah),

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	10.071.443.993	0	10.071.443.993
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	10.071.443.993	0	10.071.443.993

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp9.144.984.193,00 (sembilan miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)

Mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 55. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 56. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang bangunan gedung sebagai berikut

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	10	9.114.984.193
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp

1.169.138.661,00 (satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan enam ratus enam puluh satu rupiah).

b. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp926.459.800,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar Rp926.459.800,00 ((sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit engan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Tabel 58. Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil	-		642.717.800

Mutasi kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Tabel 59. Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil	-		-

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Tugu Titik Kontrol/Pasti Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	283.742.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 62.117.604,00 (enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat rupiah).

VI. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp995.251.376,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp995.251.376,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	995.251.376	0	995.251.376
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	995.251.376	0	995.251.376

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp198.560.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 434 m² dengan nilai sebesar Rp198.560.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar

Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Tabel 62. Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas bertambah (m ²)	Kuantitas berkurang (m ²)	Total (M ²)
Nihil		-	

Mutasi kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Tabel 63. Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	434	995.251.376
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah

sebesar Rp158.848.000,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

b. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp787.691.376,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 495 m² dengan nilai sebesar Rp787.691.376,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Mutasi tambah Irigasi tersebut meliputi:

Tabel 65. Mutasi Tambah Irigasi Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Mutasi kurang Irigasi tersebut meliputi:

Tabel 66. Mutasi Kurang Irigasi Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 67. Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	495	787.691.376
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 103.646.416,00 (seratus tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah).

c. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Mutasi tambah Jaringan tersebut meliputi:

**Tabel 68. Mutasi Tambah Jaringan Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Per 30 Juni 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Mutasi kurang Jaringan tersebut meliputi:

Tabel 69. Mutasi Kurang Jaringan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	2	9.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

VII. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada **Laporan Barang Kuasa Pengguna** Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) , jumlah tersebut terdiri atas mutasi tambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN		BERTAMBAH				BERKURANG			
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1,	385.000	0	0	0,	0	1,	385.000,

VIII. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah)

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Tabel 71. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Nihil	

Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

IX. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada **Laporan Barang Kuasa Pengguna** Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Stasiun PSDKP Tahun Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

GOLONGAN BARANG	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)
Nihil	0	0

Mutasi tambah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Tabel 74. Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)	Total (Rp)

Mutasi kurang Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Tabel 75. Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)	Total (Rp)

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Tahuna antara lain:

Tabel 76. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
		0	0

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Tabel 77. Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Tabel 78. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Tahuna per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

c. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 87. Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

GOLONGAN BARANG	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	385.000
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0	385.000

Daftar BMN tersebut di hentikan penggunaannya karena di usulkan untuk penghapusan

Tabel 88. Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil		385.000	385.000

Tabel 89. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

A. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 53.187.349.340,00 (lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	676.774.670	100	0	0	676.774.670	100
	Sub Jumlah (I)	676.774.670	100	0	0	676.774.670	100
I	Aset Tetap						
1	Tanah	2.228.156.034	100	0	0	2.228.156.034	100
2	Peralatan dan Mesin	39.889.125.937	99,02	1.493.500	0,008	39.890.619.437	100
3	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	100	0	0	10.071.443.993	100
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	995.251.376	100	0	0	995.251.376	100
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	53.185.855.840	100	1.493.500	100	53.187.349.340	100
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	385.000	0	385.000	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0	0
Total		53.185.855.840	100	1.878.500	100	53.187.349.340	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel 91. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Aset Tetap						
2	Peralatan dan Mesin	39.889.125.937		1.493.500		39.890.619.437	100
3	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	100		0	10.071.443.993	100
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	995.251.376	100		0	995.251.376	100
5	Aset Tetap Lainnya						
	Sub Jumlah (I)						
I	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
2	Aset Tak Berwujud						

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			385.000		385.000	
	Sub Jumlah (I)						
Total		53.185.855.840				53.187.349.340	100

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisi h
1	Persediaan	676.774.670	676.774.670	0
2	Tanah	2.228.156.034	2.228.156.034	0
3	Peralatan dan Mesin	39.890.619.437	39.890.619.437	0
4	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	10.071.443.993	0
5	Jalan dan Jembatan	198.560.000	198.560.000	0
6	Irigasi	787.691.376	787.691.376	0
7	Jaringan	9.000.000	9.000.000	0
8	Aset Tetap Renovasi	0	0	0
9	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.321.523.866	39.321.523.866	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.231.256.265	1.231.256.265	0
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	158.848.000	158.848.000	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	103.646.416	103.646.416	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	3.950.000	3.950.000	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0	0
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
18	Hak Cipta	0	0	0

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
19	Paten	0	0	0
20	Software	0	0	0
21	Lisensi	0	0	0
22	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
23	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
24	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	385.000	0	0
26	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
27	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	385.000	0	0
29	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
30	Akumulasi Amortisasi i Paten	0	0	0
30	Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
32	Akumulasi Amortisasi i Lisensi	0	0	0
33	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0	0
Total				0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 93. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna
Tahun 2020-2025 (5 tahun terakhir)**

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2021	50.868.466.249	5.986.907.079	13,3
2	2022	50.698,350,249	-71.110.249	
3	2023	52.782.213.346	2.083.863.097	
4	2024	53.162.993.140	380.779.794	
5	2025	53.187.349.340	24.356.147	

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 94. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025**

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	2.228.156.034	0
2	Peralatan dan Mesin	38.043.003046	82.961.000
3	Gedung dan Bangunan	9.428.726.193	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0

Penetapan Status Penggunaan BMN Stasiun PSDKP Tahuna telah Terbit SK Penetapan Status Penggunaan yang diterbitkan oleh KPKNL Manado dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun asset tersebut adalah :

1. Tanah Bangunan Kantor 3 (tiga) lokasi dengan izin prinsip No. B.1123/SJ/PL.930/X/2018 dan SK PSP Kementerian Keuangan No. 241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 senilai Rp574.030.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
2. Gedung dan Bangunan sejumlah 26 (dua puluh enam) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.101/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 senilai Rp11.475.734.000,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Kendaraan darat sejumlah 8 (delapan) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.100/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 tanggal 12 September 2018 dengan nilai sebesar Rp1.172.402.260,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).
4. Kendaraan Laut sejumlah 3 (tiga) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.110/KM.6/KN.5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp32.653.697.411,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah).
5. Peralatan dan Mesin diatas 100 Juta sejumlah 1 (satu) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.99/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 sebesar Rp138.117.125,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
6. Peralatan dan mesin sejumlah 255 unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 dengan nilai penetapan Rp1.037.502.130,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

7. Peralatan dan mesin sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan SK.PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.887/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai penetapan Rp.221.835.500,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
8. Jaringan sejumlah 2 (dua) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.733/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai penetapan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
9. Bangunan Mess Operator sejumlah 2 (dua) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.07/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp1.876.837.884,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Irigasi (Talud Penahan Air) sejumlah 1 (satu) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.24/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp426.646.350,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
11. Tanah Kantor sejumlah 1 (satu) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.71/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp574.030.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
12. Peralatan dan mesin sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.36/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp332.474.640,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
13. Peralatan dan mesin sejumlah 3 (tiga) unit Kendaraan dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.270/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp485.400.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
14. Peralatan dan mesin sejumlah 5 (lima) unit dengan SK PSP

Kementerian Kelautan dan Perikanan
no.293/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021 tanggal 30 Mei 2021 dengan
nilai akumulasi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta
rupiah).

15. Gedung dan Bangunan sejumlah 1 (satu) unit dengan SK PSP
Kementerian Keuangan No.189/KM.6/KNL.1601/2022 senilai
Rp1.386.010.546,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta
sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
16. Peralatan dan mesin sejumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga) unit dengan
SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No.426/KEPMEN-
KP/SJ/PL.710/2022 tanggal 26 Juni 2022 dengan nilai akumulasi Rp
261.276.565,00 (dua ratus tujuh enam puluh satu juta dua ratus tujuh
puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
17. Peralatan dan Mesin sejumlah 16 (enam belas) unit dengan SK PSP
Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 884/KEPMEN-
KPSJ/PL.710/2023s tanggal 23 Oktober 2023 dengan nilai akumulasi
Rp. 93.408.730 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu
tujuh ratus tiga puluh rupiah)
18. Peralatan dan mesin sejumlah 8 (delapan) unit dengan SK PSP
Kementerian Kelautan dan Perikanan No.188/KEPMEN-
KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 29 Juni 2024 dengan nilai akumulasi Rp.
228.346.210 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh
enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)
19. Peralatan dan mesin sejumlah 24 (dua puluh empat) unit dengan SK
PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 1146/KEPMEN-
KP/PL.710/XI/2025 tanggal 8 November 2024 dengan nilai akumulasi
Rp. 117.384.510 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh
empat ribu lima ratus sepuluh rupiah)

b. Pengelolaan BMN

Tabel 95. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Tahuna per 30 Juni 2025

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtang Anan	Penghapus An	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang	13	0	0	0	13
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	0	0	0
TOTAL		13	0	0	0	13

*) hanya diperlukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB E-1

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Tabel 96. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Nilai Perolehan
	UPS	1	Rusak Berat	385.000

b. Daftar Barang Hilang

Tidak terdapat nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN *Intrakomptabel* sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN *Ekstrakomptabel* sebesar Rp0,00 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Ringkasan BMN Hilang Pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025

No.	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

4. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang akan diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Tahuna paa semester II 2025, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Nilai Perolehan
	UPS	1	Rusak Berat	385.000

5. BMN Berupa Aset Tetap yang dinyatakan Hilang.

Tidak terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Tahuna Per 30 Juni 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 99. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang Per 30 Juni 2025

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

6. Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021

Sesuai dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 dengan Nomor 10b/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, Pangkalan PSDKP Tahuna terdapat beberapa temuan antara lain :

- a. Proses Geotagging untuk pengendalian data keberadaan Aset tetap dan aset lainnya yang belum diselesaikan. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan melengkapi foto geotagging per aset

- b. Pencatatan Aset Tetap dalam Aplikasi SIMAN tidak mencantumkan informasi lokasi/Alamat yang jelas. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi lokasi/alamat pada Kartu Identitas Barang (KIB)
- c. Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang dicatat dalam Aplikasi SIMAN belum didukung dengan bukti Kepemilikan yang sah. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Pembangunan Kapal, BPKB dan STNK. Namun masih terdapat aset yang dalam proses tindak lanjut berupa Bangunan sebanyak 4 NUP yang masih memerlukan Sertifikat Laik Fungsi/SLF yang masih terkendala.

7. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN.

8. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah.

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Pengelola Barang yaitu KPKNL wilayah setempat;
- Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dalam hal ini yaitu Biro Keuangan, KKP;
- Berkoordinasi dengan Eselon I Ditjen PSDKP.

9. Pengungkapan lain-lain

-

Kuasa Pengguna Barang Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Tahuna



Marthin Y. Nias Luhulima, S.H., Pi, M.Si